

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Manusia menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, seperti mengelola, mengakses, menyebarkan informasi, dan membantu pekerjaan sehari-hari. Teknologi mutakhir berkembang cukup pesat, situasi ini menjadi pendorong untuk terus melakukan berbagai eksperimen, penelitian dan pengembangan guna memudahkan manusia untuk menjalankan aktivitas. (Yusmaida, Neneng, 2020)

Desa cerdas merupakan konsep yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan pelayanan yang lebih baik bagi warganya. Konsep dasar desa cerdas adalah menghimpun masyarakat dari segala aspek dan mengintegrasikannya dengan teknologi informasi untuk memberi manfaat bagi masyarakat desa. Desa cerdas berfokus pada pengoptimalan perangkat teknologi informasi, penguatan *human investment* dan modal sosial masyarakat untuk memenuhi investasi infrastruktur desa. Konsep desa cerdas merupakan solusi lain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasik yang ada di desa selama ini, guna mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa. Permasalahan klasik semakin kompleks dan berkepanjangan, sehingga diperlukan alternatif pemecahannya, dengan menggunakan teknologi guna meng-upgrade cara, dan proses dalam menyelesaikan masalah yang ada di desa. (Huda dkk., 2020)

Administrasi kependudukan adalah pengelolaan data yang berkaitan dengan informasi kependudukan yang meliputi data kependudukan, data kelahiran, data kematian dan surat-menyurat. Administarasi kependudukan merupakan peristiwa penting yang membutuhkan bukti resmi untuk pengelolaan dan pencatatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. (Anraeni dkk., 2020). Pelayanan administrasi kependudukan yang

sering di butuhkan masyarakat desa adalah pelayanan pembuatan surat-menyurat seperti surat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Izin Keramaian dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Hal tersebut merupakan pelayanan guna memberikan hak dan kebutuhan dasar masyarakat desa.

Pada saat ini mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Kotabaru Barat masih menggunakan cara konvensional. Masyarakat harus datang ke kantor desa untuk mengetahui prosedur layanan yang di inginkan. Hal tersebut menyebabkan proses pencatatan dan pembuatan administrasi kependudukan membutuhkan waktu yang cukup lama. Masalah lainnya yang muncul yaitu sering terjadinya antrian sehingga proses layanan membutuhkan waktu yang seringkali melebihi standar waktu maksimal yang telah ditetapkan. Ketidakpastian selesainya layanan yang tertunda pada hari-hari berikutnya juga sering terjadi akibat tidak adanya mekanisme untuk memantau progres penyelesaian layanan sehingga berdampak pada munculnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dikarenakan lebih dari satu kali ke tempat pelayanan.

Pelayanan administrasi kependudukan yang terkomputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data kependudukan pemerintah daerah khususnya di tingkat desa sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data. Suatu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi pemerintah desa adalah pengolahan data penduduk melalui komputerisasi teknologi informasi didalam organisasi pemerintah desa dalam pengembangan teknologi informasi adalah dengan membangun sebuah sistem yang menampung proses administrasi kependudukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan yang baik (Henny, 2020). Hal ini didukung dengan bukti empiris penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khaerunnisa dan Nofiyati (2020) bahwa *smart village* dapat meningkatkan kinerja perangkat desa dalam mengolah data-data dan informasi yang dimiliki agar lebih akurat dan efisien, maupun dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh (Setiawan, 2016) hasil perancangan sistem informasi kependudukan memiliki banyak keunggulan diantaranya membantu proses pendataan penduduk dan proses pembuatan surat menyurat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan sejalan dengan menerapkan bagian dari konsep desa cerdas maka diperlukan perancangan administrasi kependudukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi sebagai langkah awal pengembangan desa cerdas. Adanya sistem yang akan dikembangkan diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengetahui persyaratan yang dibutuhkan dalam

melengkapi kepengurusan perlengkapan dokumen yang ingin dibuat, kepastian waktu pelayanan yang di butuhkan, dan jaminan *output* yang di terima dengan hanya menggunakan komputer dan *smartphone* di rumah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan menerapkan model desa cerdas untuk pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur?”

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah “Merancang dan menerapkan model desa cerdas untuk pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur”.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya di lakukan di satu desa yaitu Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.
2. Penelitian ini hanya membahas desa cerdas dalam lingkup pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur.
3. Adapun surat-surat yang di bahas dalam sistem yang akan dikembangkan adalah surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Izin Keramaian dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur dalam meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakatnya dan memudahkan staf desa dalam melayani masyarakat serta menjadi alternatif baru dalam menerapkan pelayanan yang lebih efektif.